

30 RIBU BALITA DI SIAK JADI TARGET PREVALENSI STUNTING MENUJU SATU DIGIT



Sumber gambar:

<https://www.klinisia.id/artikel-kesehatan/yuk-kenali-3-pesan-kunci-stunting-karena-cegah-stunting-itu-penting/>

Riauterkini-SIAK - Kampanye intervensi stunting serentak yang berlangsung secara nasional pada akhir Juni lalu, memiliki target bagaimana pemerintah dapat mengukur tingkat kesehatan anak balita secara nasional. Di Kabupaten Siak, dari 14 kecamatan terdapat 30 ribu lebih balita, menjadi sasaran penimbangan dan target pelaksanaan penimbangan balitanya mencapai 100 persen.

“Terdapat lebih dari 30 ribu balita, se-Kabupaten Siak, antara sasaran balita yang akan kita timbang dengan proses penimbangan yang dilakukan mencapai target 100 persen. Dan ini baru pertama sejak kabupaten berdiri,” kata Wakil Bupati Siak Husni Merza, beberapa hari lalu. Keberhasilan ini tambah Husni, berkat kerja keras dan sinergi, kolaborasi, dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah.

Ia bilang, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai, akhirnya membawa Siak pada juara pertama penilaian tingkat provinsi aksi konvergensi penurunan stunting se-Provinsi Riau tahun 2024. Siak mengungguli dari 11 kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. “Alhamdulillah, Siak dari 12 kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau, yang awalnya kita di bawah, tahun 2024 kita meraih yang pertama 100 persen anak-anak balita kita diukur.

Kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam capaian target tersebut,” kata dia.

Selain itu, Kabupaten Siak juga menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang masuk dalam 15 besar penurun stunting terbaik tingkat nasional, berada di urutan ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Dengan kategori percepatan penurunan stunting kategori prevalensi. “Karena konvergensi kita terbaik 1 se Provinsi Riau 2024, kita juga masuk 15 terbaik nasional. Sehingga mengantarkan Pak Bupati menerima penghargaan pada puncak peringatan pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Semarang,” sebut Ketua TPPS Kabupaten Siak itu.

Atas capaian ini, Husni mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Siak, Terutama OPD terkait, Dinas Kesehatan, DP3KB, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu sebagai garda terdepan dan TPPS kabupaten Siak. “Kami apresiasi ini, merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Siak. Dengan pencapaian ini, mari kita jadikan momentum untuk semakin bersemangat dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas di Kabupaten Siak,” kata dia lagi.

Di hadapan ASN, Husni mengajak terus mengembangkan program dan inovatif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan makanan bergizi, rutin ke posyandu serta edukasi calon pengantin penting mencegah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia, sehingga dapat mencegah stunting.

“Insyaallah, jika memang nanti hasil pengukuran serentak anak-anak balita ini, bisa dijadikan pengganti survey Standar Gizi Indonesia (SGI) tahun 2024 ini, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi keinginan kita bersama, prevalensi stunting yang kita targetkan menjadi satu digit, bisa tercapai. Sekarang kita masih 2 digit di angka 10,04 persen dan akan menuju 1 digit,” tandasnya. (Infotorial/adji)

Sumber berita:

1. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217136, “30 Ribu Balita di Siak Jadi Target Prevalensi Stunting Menuju Satu Digit”, 9 Juli 2024; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/11/30-ribu-balita-di-siak-riau-bakal-ditimbang-sebagai-upaya-tekan-angka-stunting?page=all>, “30 Ribu Balita di Siak Bakal Ditimbang sebagai Upaya Tekan Angka Stunting”, 11 Juli 2024.

Catatan:

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021) mendefinisikan *Stunting* sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah berupaya melakukan percepatan penurunan *Stunting* dengan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perpres 72/2021 adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk:

1. menurunkan prevalensi *Stunting*;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut meliputi:

remaja;

1. calon pengantin;
2. ibu hamil;
3. ibu menyusui; dan
4. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Perpres 72/2021 juga telah menetapkan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah desa;

2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maka perlu disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

1. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
2. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
3. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
4. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
5. audit kasus *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *stunting* disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.